



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI MURNI WAHYUNINGSIH
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 795095

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/239 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2613 m2/2613 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 333 m2/333 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 463 m2/463 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 78.400.000**

1. MOBIL, DAIHATSU F600RV-GMDFJJ/XENIA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, LAINNYA Rp. 8.000.000
5. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000
6. LAINNYA, GENIO SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 64.300.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	248.532.369
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.741.232.369
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.741.232.369

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.